

PENGARUH KOMUNIKASI POLITIK KEPALA DAERAH TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK DI KABUPATEN SINTANG

Korbeca Aura Isabella

NPP.31.0595

Asdaf Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email : korbecaauraisabella@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Ani Martini, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP) : *The formulation of the research problem includes questions about the influence and how much influence the Regional Head's political communication has on publik trust in the region. **Purpose :** This research aims to investigate the influence of political communication carried out by Regional Heads on publik trust in Sintang Regency. **Methods :** The research method used is a correlational method with a quantitative approach, which utilizes statistical analysis to manage the data obtained. The research sample was determined based on the Permanent Voter List (DPT) in the 2020 Sintang Regent and Deputy Regent Election, with the assumption that the DPT reflects the voter base that is directly involved in the democratic process. **Results :** The research results show that there is a significant influence between the political communication of Regional Heads and the level of publik trust in Sintang Regency. This is reinforced by the results of a simple linear regression test which shows the calculated t value is much greater than the t tabel value, as well as the results of the Spearman Rank correlation hypothesis test which shows a positive and very strong relationship between political communication and publik trust. According to Standardized Coefficients Beta, it can be seen that the indicator Personal Branding has the biggest influence on public trust. **Conclusion :** The implications of this research emphasize the importance of effective political communication from Regional Heads in strengthening publik trust, which in turn can increase government legitimacy and community participation at the local level.*

Keywords: *Political Communication, Regional Head, Publik Trust*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Rumusan masalah penelitian mencakup pertanyaan tentang adanya pengaruh dan seberapa besar pengaruh komunikasi politik Kepala Daerah terhadap kepercayaan publik di wilayah tersebut. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh komunikasi politik yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Sintang. **Metode :** Metode penelitian yang digunakan adalah metode korelasional dengan pendekatan kuantitatif, yang memanfaatkan analisis statistik untuk mengelola data yang diperoleh. Sampel penelitian ditentukan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang tahun 2020, dengan asumsi bahwa DPT mencerminkan basis pemilih yang secara langsung terlibat dalam

proses demokratis. **Hasil/Temuan** : Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara komunikasi politik Kepala Daerah dan tingkat kepercayaan publik di Kabupaten Sintang. Hal ini diperkuat oleh hasil uji regresi linear sederhana yang menunjukkan nilai t hitung yang jauh lebih besar dari nilai t tabel, serta hasil uji hipotesis korelasi Rank Spearman yang menunjukkan hubungan positif dan sangat kuat antara komunikasi politik dan kepercayaan publik. Dari hasil uji standar koefisien beta didapatkan indikator *personal branding* yang paling tinggi pengaruhnya terhadap variabel Kepercayaan Publik. **Kesimpulan** : Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya komunikasi politik yang efektif dari Kepala Daerah dalam memperkuat kepercayaan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan legitimasi pemerintahan dan partisipasi masyarakat di Tingkat lokal.

Kata Kunci : Komunikasi Politik, Kepala Daerah, Kepercayaan Publik

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepercayaan publik/masyarakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dimana dijelaskan bahwa membangun kepercayaan publik pada penyelenggara pelayanan publik harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara tentang peningkatan pelayanan publik. Kepercayaan memberikan legitimasi publik dan dapat menghasilkan modal sosial bagi pemerintah, yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan politik dan sosial dalam pelaksanaannya. Kepercayaan publik merupakan variabel penting terwujudnya *good governance*. Berbagai produk yang dibuat oleh pemerintah, mulai dari produk kebijakan hingga produk layanan, sangat dipengaruhi oleh kepercayaan publik (Andhika, 2018).

Ombudsman RI melakukan tabulasi pada 20 jenis instansi tahun 2023. Dari 20 instansi tersebut, terlihat 5 instansi yang paling banyak diadukan adalah instansi Pemda sebanyak 985 aduan, disusul BUMN/BUMD 239 aduan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) 236 aduan, kementerian 203 aduan, dan kepolisian 172 aduan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja instansi Pemerintah Daerah masih kurang memuaskan bagi masyarakat Indonesia. Salah satu indikator untuk menilai kepercayaan publik kepada pemerintah adalah dengan menghitung dimensi kesediaan, dimana penilaian kepercayaan yang dapat dibangun melalui kinerja, perilaku, dan kebijakan yang dapat membuat masyarakat lebih percaya pada pemerintah (Zanuar et al., 2023). Sedangkan, berdasarkan data empiris terkait kinerja Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang justru memperoleh nilai terendah sebagai hasil evaluasi kinerja organisasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2023, Kabupaten Sintang memperoleh nilai CC dalam penilaian SAKIP dengan urutan terbawah dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Selain itu Bupati Sintang mengalami sakit yang berdampak pada keterbatasan kinerja kepemimpinan. Kondisi kesehatan Bupati yang tidak memungkinkan untuk memimpin dengan optimal menciptakan kekhawatiran dan ketidakpastian di tengah masyarakat. Sehingga diperlukan adanya antisipasi dan upaya langsung terkait mengembalikan kepercayaan publik khususnya pada masyarakat Kabupaten Sintang dengan berbagai persoalan yang ada. Swanson dan Nimmo (2010), berpendapat bahwa "*the strategic use of political communication is to influence publik knowledge, beliefs, and action on political matters*".

Komunikasi politik adalah penelitian tentang cara-cara komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi pengetahuan publik, kepercayaan, dan tindakan politik, serta hubungan antara kampanye politik dan subjeknya. Komunikasi politik para elite menentukan terbangunnya kepercayaan masyarakat baik di tingkat menengah maupun bawah (Ali et al.,

2022). Untuk mencapai peningkatan terhadap kepercayaan publik terkait opini pemerintah yang baik dan pelayanan yang memuaskan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang harus menerapkan pola komunikasi politik yang sesuai dan terencana agar strategi dalam upaya mengambil simpati masyarakat dan kepercayaan bisa berhasil. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sintang menunjukkan beberapa hal seperti yang sudah dilakukan oleh bapak Jarot winarno selama masa jabatannya sebagai Bupati Sintang. Melalui akun instagramnya, beliau konsisten dalam berinteraksi dan menyampaikan informasi politik kepada masyarakat Kabupaten Sintang. Adanya komunikasi politik yang sesuai dan didukung dengan gencarnya pemberitaan media sosial yang positif diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kembali terhadap Bupati Sintang.

1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan data empiris terkait kinerja Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang memperoleh nilai terendah sebagai hasil evaluasi kinerja organisasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2023, Kabupaten Sintang memperoleh nilai CC dalam penilaian SAKIP dengan urutan terbawah dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat sehingga menjadi faktor menurunnya tingkat kepercayaan publik. Indikasi adanya penurunan kepercayaan publik terhadap instansi pemda yang terjadi di Kabupaten Sintang dapat dilihat juga berdasarkan survei penilaian integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2022 yang mendapati bahwa Kabupaten Sintang memiliki resiko tinggi akan tindak pidana korupsi aspek pengelolaan anggaran dan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Resiko Korupsi Aspek Pengelolaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sintang

Deskripsi	Risiko Korupsi (2021)	Risiko Korupsi (2022)	Level Risiko (2021)	Level Risiko (2022)
Persepsi terjadinya penyalahgunaan anggaran	0.16	0.18	Tinggi	Tinggi
Persepsi penyalahgunaan anggaran Perdin	0.14	0.15	Tinggi	Tinggi
Pengalaman penyalahgunaan anggaran Perdin	0.06	0.07	Tinggi	Tinggi
Persepsi penyalahgunaan anggaran Honor dll. tidak sesuai	0.10	0.12	Tinggi	Tinggi
Pengalaman penyalahgunaan anggaran Honor dll. tidak sesuai	0.06	0.07	Tinggi	Tinggi
Persepsi penyalahgunaan anggaran kantor oleh Pejabat	0.09	0.14	Tinggi	Sangat Tinggi
Pengalaman penyalahgunaan anggaran kantor oleh Pejabat	0.03	0.08	Sedang	Sangat Tinggi

Sumber: Diolah dari Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023

Permasalahan juga timbul akibat ketidakbenaran informasi dari media sosial yang membuat masyarakat kecewa dan merasa dibohongi dengan perbedaan pemberitaan yang terjadi. Bahkan mereka mulai menyadari bahwa keterbukaan informasi publik hanya sekedar semboyan saja namun tidak pernah diterapkan dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang. Berikut merupakan beberapa bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap program dan kebijakan Bupati Sintang berdasarkan pemberitaan di media massa online:

Protes Masyarakat Terhadap Kebijakan/Tindakan Bupati Sintang

No.	Kebijakan/Tindakan	Alasan Masyarakat Protes	Sumber Informasi
1.	Menerbitkan Surat Peringatan Kedua terkait pembongkaran bangunan Masjid Miftahul Huda	Masyarakat percaya bahwa keputusan Bupati Sintang untuk menerbitkan surat peringatan tentang pembongkaran masjid milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Balai Harapan merupakan diskriminasi dan pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk beribadah yang dijamin oleh Konstitusi. Tindakan Bupati Sintang ini menjadi contoh buruk dari kepala daerah yang melanggar konstitusi negara.	Media Imparsial, 2021
2.	Demo terhadap Bupati tetapi Bupati ternyata mengugaskan Wakilnya untuk menerima para demonstran	Masyarakat berpendapat bahwa mereka memilih pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah. Jika tidak mampu, maka haruslah pemimpin tersebut mundur dari jabatannya. Sebagian massa berseru: "Silakan mundur, silakan mundur!". Bupati yang mereka maksud adalah Jarot Winarno yang sedang menjabat saat ini.	RUAI TV, 2023
3.	Sintang meraih penghargaan peringkat pertama Keterbukaan Informasi Publik se- Kalimantan Barat	Baliho tertulis keterbukaan dipandang dengan baik oleh masyarakat. Namun, banyak kinerja yang tidak diketahui. "Jangan marah kalau kalian disebut tidak kerja, kami tidak membutuhkan pencitraan, sebaliknya, kami butuh bukti nyata. Jangan hanya menjadikan keterbukaan sebagai slogan" kata masyarakat.	Tribun Pontianak, 2023
4.	Ada dugaan bahwa Bupati Sintang Jarot Winarno juga diduga terlibat dalam kasus korupsi Jembatan Ketungau II. Jarot sendiri terlibat dalam kasus ini karena dia disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang menerima fee.	Masyarakat berharap setiap orang yang terlibat dihukum sesuai dengan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukannya yang sama di mata hukum.	Suara Pemred, 2023

Sumber: Diolah dari (Media Imparsial,2021; RUAI TV,2023; Tribun Pontianak,2023; dan Suara Pemred,2023)

Keberhasilan dalam mengatasi semua permasalahan ini tergantung dari penerapan komunikasi politik yang baik dalam memberikan informasi yang tepat dan akurat, keterbukaan yang tulus dan tepat, dan penjelasan mengenai keputusan membentuk kepercayaan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk itu, penelitian ini penting dilakukan guna mencapai peningkatan terhadap kepercayaan publik terkait pola komunikasi politik Kepala Daerah, kepercayaan publik terhadap figur Bupati Sintang, serta pengaruh komunikasi politik Kepala Daerah terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Sintang.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian penulis. Hasil kajian ini akan menunjukkan apa saja yang diperoleh dari penelitian

sebelumnya, lalu akan ditunjukkan perbedaan dan persamaannya. Penulis menguraikan 7 (tujuh) penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan variabel penelitian dan sebagai pembanding dalam penelitian ini untuk menjadi referensi dan memperkaya teori pada penelitian yang akan dilaksanakan. Pertama, pada penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Syam (2017), memiliki persamaan ada pada topik yang dibahas yaitu berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik. Namun perbedaannya pada metode penelitian, dimana penulis menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian terdahulu yang pertama menggunakan kuantitatif deskriptif.

Kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Alfiyani (2018), memiliki persamaan ada pada topik yang dibahas yaitu berkaitan dengan komunikasi politik. Namun perbedaannya pada metode penelitian, dimana penulis menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian terdahulu yang kedua menggunakan kualitatif. Ketiga, pada penelitian yang dilakukan oleh Tamara et.al. (2020) dan Haq, (2022) memiliki persamaan ada pada topik yang dibahas yaitu berkaitan dengan komunikasi politik yang digunakan sebagai variabel penelitian. Namun perbedaannya pada metode penelitian, dimana penulis menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian terdahulu yang kedua menggunakan kualitatif. Keempat, pada penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2018), memiliki persamaan ada pada topik yang dibahas yaitu berkaitan dengan komunikasi politik yang digunakan sebagai variabel penelitian. Namun perbedaannya pada penambahan variabel partisipasi politik sedangkan penelitian ini menggunakan variabel kepercayaan publik. Kemudian metode penelitian terdahulu menggunakan mixmethod sedangkan penulis menggunakan metode kuantitatif. Kelima, pada penelitian yang dilakukan oleh Hastrida & Hendriyani (2023), memiliki persamaan pada penggunaan metode penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Namun perbedaannya ada pada topik yang dibahas yaitu berkaitan dengan komunikasi dialogis dan penelitian yang akan penulis lakukan nantinya berkaitan dengan komunikasi politik. Keenam, pada penelitian yang dilakukan oleh Situmorang et al.,(2023) dan Jumadi & Silviani (2020) memiliki persamaan ada pada topik yang dibahas yaitu berkaitan dengan komunikasi politik dan kepercayaan publik sebagai variabel. Namun perbedaannya pada penggunaan metode penelitian yang menggunakan kualitatif sedangkan penulis menggunakan metode kuantitatif.

Ketujuh, pada penelitian yang dilakukan oleh Oktavia, (2020), Nurmalinga & Purworini, (2022), Ramadhania, (2022), dan Marpaung, (2022) memiliki persamaan ada pada topik yang dibahas yaitu berkaitan dengan kepercayaan publik sebagai variabel Y kemudian metode penelitian yang menggunakan kuantitatif. Namun perbedaannya pada variabel X-nya, dari keempat penelitian sebelumnya tidak ada yang menggunakan 'Komunikasi Politik' sebagai variabel X.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat berbagai komponen yang saling berkesinambungan dengan apa yang diteliti oleh ketujuh peneliti tersebut termasuk dengan penelitian ini. Keterkaitan dalam penelitian tersebut terletak pada topik yang dibahas yakni tentang kepercayaan publik dan komunikasi politik. Namun fokus dalam penelitian ini yakni membahas tentang pengaruh komunikasi politik kepala daerah terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Sintang. Ketujuh penelitian terdahulu tersebut akan menjadi satu kesatuan dalam penelitian ini dan sangat membantu memperkaya wawasan peneliti dan mendukung penelitian ini karena sumber data yang valid.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh komunikasi politik Kepala Daerah terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Sintang serta besarnya pengaruh komunikasi politik Kepala Daerah terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Sintang.

II. METODE

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode korelasional dengan pendekatan kuantitatif, yang memanfaatkan analisis statistik untuk mengelola data yang diperoleh. Sampel penelitian ditentukan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang tahun 2020, dengan asumsi bahwa DPT mencerminkan basis pemilih yang secara langsung terlibat dalam proses demokratis. Dalam penelitian ini instrumen yang dipakai yakni daftar berupa pertanyaan yang didalamnya memuat pertanyaan yang bersifat tertutup yang berisi operasional variabel penelitian. Instrumen utama yang digunakan adalah lembar kuesioner yang disusun menurut Skala Likert (likert summated rating) karena yang diukur adalah sikap, pendapat, persepsi dan tanggapan responden tentang fenomena sosial. Dalam menganalisis hasil penelitian, penulis menggunakan instrumen variabel (X) Komunikasi Politik Lasswell dalam Pureklolon (2016) dan instrumen variabel (Y) Kepercayaan Publik Lijeblad (2009) dalam Zanu et, al (2023) untuk menguji hipotesis dengan menggunakan skala likert.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode korelasional bertujuan untuk mengkaji pengaruh komunikasi politik yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap tingkat kepercayaan publik di Kabupaten Sintang.

3.1 Pengaruh komunikasi politik Kepala Daerah terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Sintang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Sintang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik di Kabupaten Sintang. Hal ini terbukti dari hasil uji regresi linear sederhana yang menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $53.794 > 1.290$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara komunikasi politik Kepala Daerah dengan kepercayaan publik. Selain itu, hasil uji hipotesis korelasi Rank Spearman juga mengindikasikan bahwa komunikasi politik dan kepercayaan publik saling berkorelasi secara positif, dengan koefisien korelasi yang tinggi.

3.2 Besarnya Pengaruh Komunikasi Politik Kepala Daerah Terhadap Kepercayaan Publik Di Kabupaten Sintang

Pada variabel komunikasi politik kepala daerah (X) terdapat 5 dimensi dan 16 indikator yang dilakukan uji regresi liner sederhana dan di temukan bahwa 16 indikator pada variabel ini memiliki pengaruh yang sama signifikan terhadap 8 indikator dari 3 dimensi pada variabel kepercayaan publik (Y), sehingga tidak ditemukan indikator yang sangat berpengaruh. Hal ini tampak pada nilai $t_{hitung} >$ dari nilai t_{tabel} . Selanjutnya berdasarkan uji tabel 4.17 dari hasil uji secara parsial (uji t) pengaruh dari variabel dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi pada variabel komunikasi politik kepala daerah (X) adalah 0,000 dimana

nilai signifikansinya $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komunikasi politik kepala daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel kepercayaan publik (Y) dengan demikian komunikasi politik kepala daerah diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik komunikasi politik seorang Bupati maka semakin tinggi kepercayaan publik atau masyarakat di Kabupaten Sintang. Kemudian pada uji korelasi diketahui terdapat hubungan positif yang signifikan antara komunikasi politik dengan kepercayaan publik ($r = 0,983$, $p < 0,05$). Pada uji koefisien determinasi (R Square) tabel 4.20 diketahui nilai R Square sebesar 0,967 atau 96,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik (Y) dapat dipengaruhi sebesar 96,7% oleh variabel independen yaitu komunikasi politik (X) yang dilakukan oleh kepala daerah. Tingginya koefisien determinasi memperlihatkan bahwa model regresi yang dibangun dengan variabel komunikasi politik berhasil menggambarkan variasi dalam variabel kepercayaan publik, sehingga model tersebut dapat dianggap sebagai model yang cukup kuat untuk menangkap hubungan antara kedua variabel.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam konteks Kabupaten Sintang, di mana keberhasilan pemerintahan seringkali diukur melalui tingkat kepercayaan publik, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya komunikasi politik yang efektif dari Kepala Daerah. Komunikasi politik yang baik dapat memperkuat legitimasi pemerintah, memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis yang relevan bagi para pengambil kebijakan dan praktisi komunikasi politik dalam upaya meningkatkan kualitas pemerintahan dan mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang hubungan antara komunikasi politik dan kepercayaan publik di tingkat lokal, khususnya dalam konteks Kabupaten Sintang. Dengan menganalisis dan mengkonfirmasi pengaruh positif komunikasi politik terhadap kepercayaan publik, penelitian ini memberikan landasan yang kuat bagi upaya penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tingkat lokal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terkait pengaruh komunikasi politik kepala daerah terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Sintang melalui hasil pengelolaan kuesioner, observasi lapangan, analisis korelasi dan regresi sederhana yang diperoleh selama melaksanakan penelitian di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sintang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang efektif dari kepala daerah dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan publik penting untuk ditingkatkan karena kepercayaan publik memengaruhi legitimasi dan kinerja pemerintah, serta dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan program yang dijalankan. Pada hasil uji koefisien determinasi didapatkan R Square memiliki nilai 0.967, yang berarti besarnya pengaruh variabel X (komunikasi politik kepala daerah) terhadap variabel Y (kepercayaan publik) sebesar 96.7%. Berdasarkan hasil uji *standardized coefficients* beta, penelitian ini menyimpulkan bahwa *personal branding* dari pemimpin politik adalah indikator yang paling berpengaruh terhadap variabel kepercayaan publik. Hasil uji menunjukkan bahwa adanya *personal branding* yang kuat dari seorang pemimpin politik secara signifikan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadapnya.

2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepala daerah dan pemerintahannya adalah tanggung jawab bersama antara kepala daerah itu sendiri, anggota pemerintahannya, serta masyarakat dan media. Kepala daerah perlu berkomitmen untuk transparan, adil, dan efisien dalam kepemimpinannya. Mereka juga harus aktif berkomunikasi dengan masyarakat, mendengarkan masukan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil. Anggota pemerintahan harus mendukung dan mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Sementara masyarakat dan media memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan kolaborasi ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap kepala daerah dan pemerintahan yang dipimpinnya dapat ditingkatkan.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan utama dari penelitian ini terletak pada aspek waktu. Selain itu, penelitian ini berfokus pada satu faktor saja yang dipilih sebagai studi kasus yang mempengaruhi tingkat kepercayaan publik di Kabupaten Sintang.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih pada tahap awal. Oleh karena itu, penulis mengusulkan untuk melakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa, yang mencakup faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik di Kabupaten Sintang, dengan harapan dapat mengungkap temuan yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sintang beserta jajarannya yang telah memberikan data terkait variabel penelitian bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Alfiyani, N. (2018). Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik. *Potret Pemikiran*, 22(2), 57–69.

Ali, M., Anismar, A., Rizwan, M., Fajri, F., & Mursalin, M. (2022). Patterns of Political Communication Between Government Institutions and Effect to the Trust of the Acehese People. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 4(2), 144.

Darmawan, A., & Sya M. (2017). Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Berita Pada Media Yang Terlibat Dalam Politik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2(4), 1–11.

Fauzi. (2018). Political Communication of Legislative Candidate in Affecting Political Participation in the North Aceh District (Komunikasi Politik Calon Legislatif dalam Memengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara). *Journal Pekommas*, 3(1), 63–78.

Haq, M. A. F. (2022). Komunikasi Politik Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Serang Tahun 2018. Skripsi, Politik Indonesia Terapan. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Hastrida, A., & Hendriyani. (2023). Pengaruh Komunikasi Dialogis Terhadap Kepercayaan Pada Pemerintah. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 27(2), 141–160.

- Jumadi, H., & Silviani, I. (2020). Peranan Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Mempertahankan Kepercayaan Publik di Daerah Pilihan III Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 5(1), 44–61.
- Marpaung, S. P. (2022) Pengaruh Informasi Penanganan Covid-19 Melalui Media Sosial Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Surabaya. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.
- Nimmo, D. (2010). Komunikasi Politik Komunikator: Khalayak dan Efek. In *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Nurmalinda, Y., & Purworini, D. (2022). Pengaruh Instagram Sebagai Media Pemberitaan Covid 19 Terhadap Tingkat Kepercayaan Mahasiswa. *Jurnal Common*, 6(1), 73-85. <https://doi.org/10.34010/common.v6i1.7193>
- Oktavia, N. (2020) Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Other thesis, IAIN Bengkulu.
- Pureklolon, T. T. (2016). *Komunikasi Politik : Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ramadhania, U. (2022) Pengaruh Pemberitaan Kasus Dugaan Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Terhadap Tingkat Kepercayaan Publik Pada DPR-R.I. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
- Rian Andhika, L. (2018). Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(1), 24–42.
- Situmorang, M., Silviani, I., & Ginting, E. A. (2023). Strategi Komunikasi Partai Politik PDIP Sumut Dalam Membangun Kepercayaan Pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024. *Jurnal Social Opinion*, 7.
- Tamara, G. A., Darmastuti, A., & Warganegara, A. (2020). Pemilihan Kepala Daerah Lampung Selatan: Telaah Pengaruh Pendidikan Politik, Komunikasi Politian Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Politik. *Wacana Publik*, 14(02), 113–123
- Zanuar, A. I., Gani, A. J. A., & Wanumawatie, I. (2023). Pengaruh Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 6(6), 331–337.